

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum mampu mencapai kestabilan ekonomi. Salah satunya terlihat dari distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata. Jika bagian yang sama dari hasil produksi perekonomian diperoleh setiap orang maka pendapatan didistribusikan secara merata sempurna (Hindun et al., 2019). Distribusi pendapatan dikatakan merata apabila seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari produksi nasional, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu faktor penting yang mencerminkan kesejahteraan tersebut adalah rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan (Arsyad, 2017).

Ketimpangan pendapatan terjadi akibat perbedaan pendapatan yang signifikan antar kelompok masyarakat sehingga menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Kelompok berpendapatan tinggi cenderung mengalami peningkatan pendapatan lebih cepat dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Jika kondisi ini terus berlangsung, ketimpangan dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial (Widodo et al., 2022).

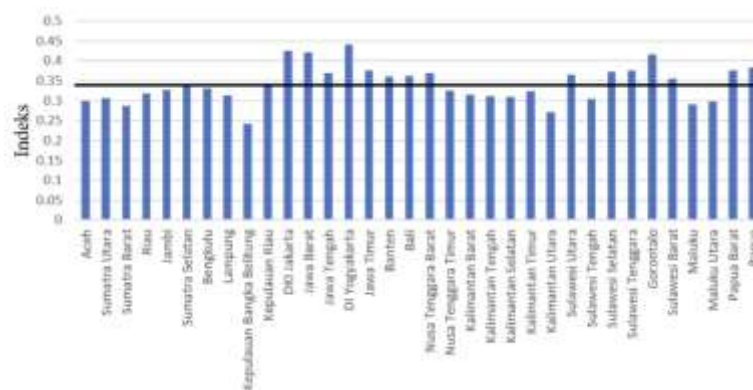
Ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan ketimpangan pendapatan telah lama menjadi isu yang kompleks dalam proses pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh berbagai negara miskin maupun negara berkembang, termasuk Indonesia (Wibowo, 2016). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang masih menghadapi tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi. Kondisi ini sebagian dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan Tenaga Kerja, rendahnya kualitas institusi dan kurangnya Infrastruktur sehingga dapat memperbesar Ketimpangan Pendapatan antarwilayah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dipicu oleh tidak meratanya proses pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah menjadi berbeda-beda (Nursahid et al., 2018).

Teori Kurva Kuznets (dalam Rambey, 2018) yang dikemukakan oleh Simon Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat adanya konsentrasi aktivitas ekonomi pada kelompok atau wilayah tertentu. Namun, seiring dengan meningkatnya pembangunan, modernisasi ekonomi, serta pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi, ketimpangan tersebut akan menurun secara bertahap sehingga membentuk pola *inverted U-curve* atau kurva U terbalik. Dalam penelitian ini, variabel Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur dipilih karena ketiga variabel tersebut merupakan faktor yang menentukan proses pemerataan pembangunan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam teori Kuznets.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Saat pandemi, ekonomi Indonesia terdampak, namun setelah pandemi pemerintah mulai melakukan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya, sehingga kondisi ekonomi cenderung berangsur pulih kembali dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi saat pandemi 2020 sekitar -2,07% dan pasca pandemi 2022 sekitar 5,31%, namun hal tersebut belum terlihat nyata dalam rata-rata nilai *Gini Ratio* di Indonesia pada pasca pandemi masih bersifat fluktuatif, tidak merata dan bahkan ada Provinsi yang nilai *Gini Ratio* jauh diatas rata-rata nasional. Oleh karena itu, menganalisis ketimpangan pendapatan pada periode pasca pandemi menjadi penting untuk melihat sejauh mana proses pemulihan ekonomi mampu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif di masa mendatang.



Gambar 1. 1 rata rata Gini Ratio tahun 2022-2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat rata-rata 2022-2024 *Gini Ratio* antar provinsi di Indonesia sangat berfluktuasi. Menurut badan pusat statistik (2024) *Gini Ratio* di Indonesia berada di tingkat ketimpangan sedang ($0,3 \leq 0,5$),

nilai *Gini Ratio* di Indonesia tahun 2022 sebesar 0,384 yang masih terbilang lebih tinggi jika kita bandingkan dengan nilai *Gini ratio* di negara berkembang lainnya seperti India sebesar 0,255 atau Vietnam sebesar 0,36 (data terbaru World Bank 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan antar provinsi di Indonesia masih belum merata, di mana masih terdapat beberapa Provinsi yang nilai *Gini Ratio* jauh di atas rata-rata nasional dan ada beberapa Provinsi yang nilai *Gini Ratio* jauh di bawah rata rata nasional. Perbedaan tingkat ketimpangan yang terjadi di setiap provinsi dapat dipengaruhi oleh variasi kondisi perekonomian daerah, seperti perbedaan tingkat pembangunan dan aktivitas ekonomi antar wilayah. Ketimpangan yang sangat berfluktuatif tersebut tercermin dari nilai *Gini Ratio* di masing-masing provinsi, di mana beberapa Provinsi cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah diantaranya Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana Provinsi Bangka Belitung tercatat sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan paling rendah, yaitu sebesar 0,241. Jika dibandingkan dengan nilai rata rata *Gini Ratio* nasional 2022-2024 sebesar 0.341, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan (Badan Pusat Statistik 2024). Tingkat ketimpangan pendapatan pada tingkat nasional cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan *Gini Ratio* yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan pada tingkat nasional.

Rendahnya nilai *Gini Ratio* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi kelembagaan dan

ekonomi daerah. Salah satunya adalah kualitas indeks demokrasi yang relatif baik sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang cukup terserap dalam berbagai sektor ekonomi turut berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai juga mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat (BPS Kepulauan Bangka Belitung, 2024).

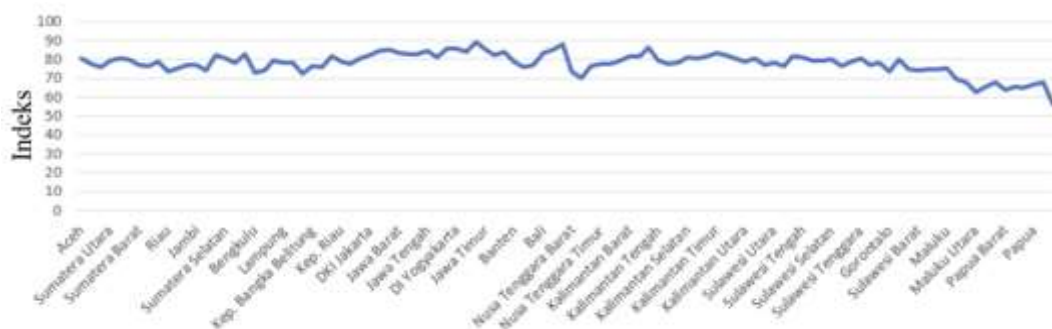
Sebaliknya, ketimpangan pendapatan yang paling tinggi diantaranya terpusat di Pulau Jawa, di mana Provinsi D.I Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata *Gini Ratio* 2022-2024 sebesar 0,441 (BPS). Nilai tersebut bahkan melampaui rata-rata *Gini Ratio* nasional 2022-2024 sebesar 0.341, sehingga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di provinsi ini relatif lebih tidak merata dibandingkan dengan kondisi ketimpangan pada tingkat nasional. Namun demikian, tingginya ketimpangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah indeks demokrasi (Ramadhan, Z, 2023), kondisi tenaga kerja (Rosalita, 2022), dan infrastruktur (Khusaini et al, 2023). Dari sisi indeks demokrasi, meskipun partisipasi masyarakat relatif tinggi, distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata sehingga kelompok tertentu lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi dibandingkan kelompok lainnya. Dari aspek tenaga kerja, dominasi pekerja di sektor informal serta tingginya proporsi pekerja dengan upah

rendah, khususnya di sektor pariwisata dan jasa, menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin melebar. Sementara itu, dari sisi infrastruktur, pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan dan kawasan wisata mendorong terjadinya ketimpangan antarwilayah, di mana daerah yang memiliki akses infrastruktur lebih baik memperoleh peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah yang relatif tertinggal.

Meskipun berbagai faktor dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada indeks demokrasi, tenaga kerja, dan infrastruktur karena ketiga variabel tersebut merepresentasikan tiga dimensi utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu kelembagaan, pasar tenaga kerja, dan konektivitas ekonomi. Ketiganya tidak hanya memiliki dasar teoritis yang kuat, tetapi juga menunjukkan fenomena empiris yang signifikan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian oleh Devita (2025), Masruri (2016), dan Khusaini et al. (2023) terkait pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan masih menunjukkan ketidakkonsistenan baik dari segi arah maupun signifikansi pengaruh. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menguji kembali relevansi ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia pada periode 2022–2024.

Oleh karena itu, penelitian ini memilih beberapa variabel yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan, yaitu indeks demokrasi sebagai indikator kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan, tenaga kerja sebagai representasi dinamika pasar kerja dan kesempatan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur jalan sebagai indikator konektivitas wilayah dan akses terhadap aktivitas ekonomi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel indeks demokrasi (Devita, 2025), tenaga kerja (Masruri, 2016), dan infrastruktur (Khusaini, 2023) berkontribusi terhadap perubahan ketimpangan pendapatan melalui mekanisme kebijakan publik, kesempatan kerja, serta peningkatan akses dan konektivitas ekonomi yang dapat mendorong pemerataan pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024 (diolah kembali)

Gambar 1.2 Indeks Demokrasi di Indonesia Tahun 2022–2024

Indeks Demokrasi Indonesia mencakup tiga dimensi utama yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi yang diukur melalui berbagai indikator partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan (BPS).

Berdasarkan grafik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022–2024 pada 34 provinsi, terlihat bahwa terdapat variasi skor demokrasi antarwilayah yang cukup signifikan. terlihat bahwa provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi tertinggi adalah D.I Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 86,25 tetapi diikuti dengan rata-rata tingkat Ketimpangan Pendapatan tertinggi juga yaitu sebesar 0,441. Sebaliknya, provinsi dengan Indeks Demokrasi terendah adalah Papua dengan nilai rata-rata sebesar 63,61 diikuti dengan rata-rata tingkat Ketimpangan Pendapatan yang lebih rendah dibandingkan D.I Yogyakarta yaitu sebesar 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Demokrasi cenderung tidak diikuti

dengan penurunan Ketimpangan Pendapatan dan masih adanya tantangan dalam penguatan sistem demokrasi pada wilayah-wilayah tersebut. Sehingga pendapatan yang diperoleh lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit, sementara sebagian besar masyarakat justru tertinggal, hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah semakin tajam (Devita, S, 2025).

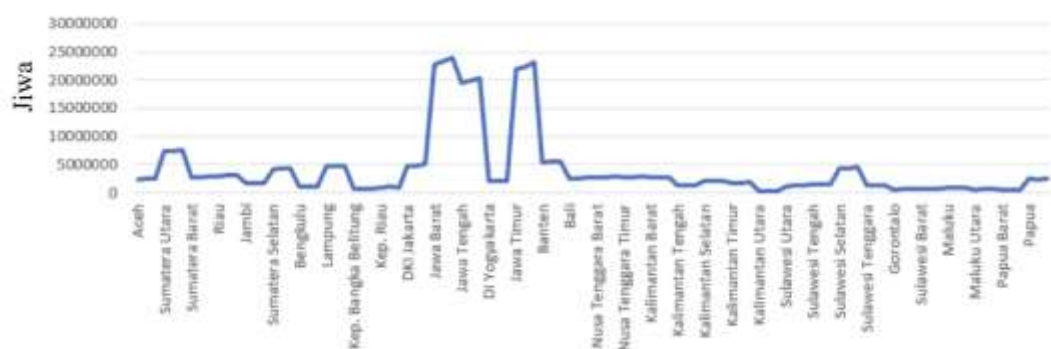
Penelitian Syafitri et al, (2025), Aditya, S. E. (2019), dan Devita, S. (2025). Menemukan bahwa Indeks Demokrasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, di mana ketika semakin tinggi indeks demokrasi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa faktor kelembagaan berperan dalam membentuk pola distribusi pendapatan regional. Sedangkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh Ramadhan, (2023) menemukan bahwa indeks demokrasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di mana ketika semakin baik demokrasi maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Begitupun sebaliknya, Ketika negara semakin tidak demokrasi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Teori yang dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson (dalam Sari, 2025) menekankan bahwa perbedaan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan antarnegara maupun antarwilayah sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang berlaku, khususnya institusi politik dan ekonomi. Fenomena ini dapat tercermin pada perbedaan *Gini Ratio* antarprovinsi, di mana daerah dengan indeks demokrasi yang lebih tinggi tidak selalu memiliki ketimpangan yang lebih rendah, terutama ketika proses demokrasi didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Secara empiris, peningkatan kualitas demokrasi juga terbukti dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan karena demokrasi yang tidak disertai dengan kualitas institusi yang kuat berpotensi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan kelompok elit bukan sebagai sarana mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Sari, 2025).

Oleh karena itu, indeks demokrasi menjadi variabel penting untuk dianalisis dalam penelitian ini karena berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme kebijakan publik, namun arah pengaruhnya masih belum konsisten secara empiris.

Selain faktor kelembagaan seperti demokrasi, dinamika pasar tenaga kerja juga merupakan determinan penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan antarwilayah. Tenaga kerja mencerminkan jumlah penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024 (diolah kembali)

Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2022–2024

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi karena berperan dalam kegiatan produksi dan distribusi pendapatan. Berdasarkan grafik tenaga kerja tahun 2022–2024 pada 34 provinsi, terlihat adanya perbedaan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan. Provinsi

dengan jumlah tenaga kerja terendah adalah Kalimantan Utara sebanyak 344.064 tenaga kerja. Rendahnya jumlah tenaga kerja di provinsi tersebut salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Selain itu, wilayah Kalimantan Utara yang masih didominasi oleh kawasan hutan dan permukiman yang tersebar menyebabkan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum berkembang secara optimal. Sedangkan Provinsi dengan jumlah tenaga kerja tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 24.086.585 tenaga kerja. Tingginya jumlah tenaga kerja di provinsi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar serta tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, Jawa Barat merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan industri di Indonesia yang memiliki banyak kawasan industri dan sektor usaha yang berkembang, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, tenaga kerja juga mencerminkan potensi sumber daya manusia yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan dalam suatu wilayah (Todaro & Smith, 2020).

Penelitian oleh Jaumotte, Lall, dan Papageorgiou (2013) menunjukkan bahwa perubahan struktur tenaga kerja memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Sedangkan hasil penelitian Rosalitta (2022) memperlihatkan temuan yang berbeda, menunjukkan bahwa

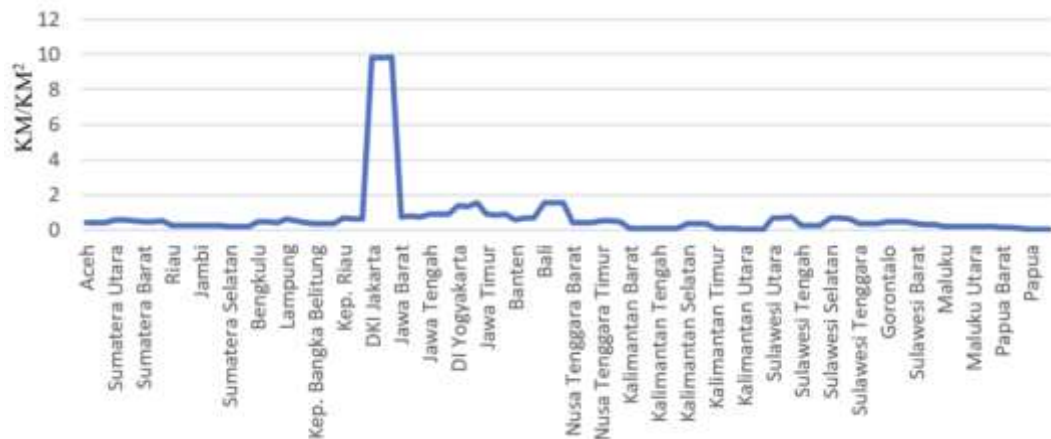
perubahan struktur tenaga kerja memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan.

Teori neoklasik dalam pasar tenaga kerja menjelaskan bahwa tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Marshall (dalam Borjas, 2016). Dalam kerangka ini, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang akan digunakan hingga mencapai tingkat produktivitas marjinalnya.

Fenomena data menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja dapat menjadi faktor penurun ketimpangan apabila disertai dengan penciptaan lapangan kerja produktif dan pemerataan upah. Sebaliknya, tanpa peningkatan kualitas dan akses pekerjaan yang setara, pertumbuhan tenaga kerja justru berpotensi memperlebar disparitas pendapatan antarprovinsi. Dengan demikian, tenaga kerja menjadi variabel yang relevan untuk diteliti karena tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlebar atau memperkecil ketimpangan tergantung pada struktur dan kualitas pasar kerja.

Selain itu, pembangunan Infrastruktur jalan berperan dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan memperluas akses ekonomi sehingga berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan (Khusaini et al., 2023). Namun, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antarprovinsi juga dapat menjadi faktor yang memperkuat disparitas *Gini Ratio*, karena daerah yang kurang memperoleh investasi infrastruktur seringkali tertinggal dalam produktivitas dan akses pasar. Penelitian terdahulu Putri et al., (2024) menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur panjang jalan berpengaruh terhadap upaya mengurangi ketimpangan

ekonomi, tetapi hasilnya tidak selalu linier karena keterbatasan kualitas dan distribusi infrastruktur yang merata.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024 (diolah kembali)

Gambar 1. 4 Rasio Infrastruktur Jalan di Indonesia Tahun 2022–2024

Berdasarkan grafik, Rasio Infrastruktur Jalan di Indonesia tahun 2022-2024 menunjukkan terdapat variasi dalam rasio Infrastruktur Jalan antar provinsi. Provinsi dengan rasio Panjang jalan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 9,841, diikuti oleh Bali sebesar 1,557 dan DI Yogyakarta sebesar 1,529. Sementara, provinsi dengan rasio Panjang jalan terendah adalah Kalimantan Utara sebesar 0,0662, Papua sebesar 0,0669 dan Kalimantan Timur sebesar 0,105. Variasi rasio Panjang jalan ini mencerminkan perbedaan dalam ukuran wilayah dan tingkat pembangunan ekonomi antar provinsi. Provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki infrastruktur jalan lebih baik dibandingkan provinsi yang berada di luar Jawa terutama di Indonesia bagian timur.

Fenomena kapasitas Infrastruktur jalan di provinsi-provinsi Indonesia menjadi faktor penting terhadap *Gini ratio*. Secara teoretis, Teori *New Economic Geography (NEG)* yang dikembangkan oleh Paul Krugman (dalam Ruthshe, G,

2024) menjelaskan bahwa distribusi aktivitas ekonomi antarwilayah sangat dipengaruhi oleh biaya transportasi, skala ekonomi, dan aksesibilitas.

Penelitian oleh Khusaini et al. (2023) mengindikasikan bahwa pembangunan jalan lebih cepat memberikan manfaat ekonomi pada daerah yang telah memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang, sedangkan daerah dengan struktur ekonomi yang masih lemah membutuhkan waktu dan dukungan kebijakan lain agar pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi pada pemerataan pendapatan. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan panjang jalan tidak selalu secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan karena efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas infrastruktur, distribusi pembangunan, dan dukungan kebijakan fiskal daerah (Wijayanti & Khoirunurrofik, 2022; Iqbal & Woyanti, 2025). Oleh karena itu, infrastruktur jalan dipilih sebagai variabel penelitian karena memiliki peran strategis dalam menghubungkan aktivitas ekonomi antarwilayah, namun dampaknya terhadap ketimpangan masih bergantung pada pemerataan pembangunan.

Meskipun berbagai penelitian telah menganalisis pengaruh demokrasi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan, hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi baik dari sisi arah maupun signifikansi pengaruh antarwilayah. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menganalisis variabel-variabel tersebut secara terpisah atau menggunakan periode sebelum pandemi, sehingga belum secara spesifik menguji dinamika ketimpangan pada fase pemulihan ekonomi tahun 2022–2024. Oleh karena itu, diperlukan analisis simultan menggunakan pendekatan data panel antarprovinsi untuk

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode terkini.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi empiris dengan menganalisis secara simultan pengaruh Indeks Demokrasi sebagai indikator kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan, Tenaga Kerja sebagai representasi kapasitas dan dinamika pasar tenaga kerja, serta Infrastruktur Jalan sebagai proksi aksesibilitas dan konektivitas ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui *Gini Ratio*. Dengan menggunakan pendekatan data panel pada 34 provinsi selama periode 2022–2024, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur secara parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*) di Indonesia periode 2022–2024?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur secara bersama terhadap Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*) di Indonesia periode 2022–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Jalan secara Parsial terhadap Ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) di Indonesia periode 2022–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur secara bersama terhadap Ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) di Indonesia periode 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian (keunggulan penelitian)

Adapun manfaat dari penelitian berjudul “ Pengaruh Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, Dan Infrastruktur Terhadap *Gini Ratio*: Studi Data Panel 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2022–2024” adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam memperdalam pemahaman tentang teori ketimpangan pendapatan, ekonomi pembangunan, dan ekonomi regional melalui analisis data panel tingkat provinsi di Indonesia.
2. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam kajian ekonomi pembangunan dan ekonomi regional terkait ketimpangan antardaerah di Indonesia, serta memperkaya karya ilmiah di Universitas Siliwangi dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengurangan ketimpangan pendapatan berbasis bukti empiris, dengan memperhatikan peran demokrasi, tenaga kerja, dan infrastruktur jalan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan antarwilayah.
4. Bagi pihak swasta, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak swasta, khususnya pelaku usaha dan investor, dalam memahami kondisi ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi, pengembangan usaha, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tepat sasaran guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ketimpangan pendapatan maupun faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel, periode, objek, maupun metode analisis yang berbeda sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

